

## BAB IV

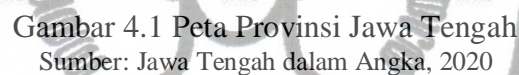
### ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

#### A. Gambaran Umum Obyek Penelitian

Menurut BPS Jawa Tengah (2020), Jawa Tengah merupakan salah satu provinsi di Pulau Jawa, yang letaknya diapit oleh dua provinsi besar, yaitu Provinsi Jawa Barat dan Jawa Timur. Provinsi Jawa Tengah secara astronomis terletak diantara  $5^{\circ}40'$  dan  $8^{\circ}30'$  Lintang Selatan serta antara  $108^{\circ}30'$  dan  $111^{\circ}30'$  Bujur Timur (sudah termasuk Pulau Karimunjawa). Jarak terjauh dari barat ke timur yakni 263 km serta jarak terjauh dari utara ke selatan yakni 226 km (belum termasuk Pulau Karimunjawa). Luas wilayah Jawa Tengah yakni sebesar 3,25 juta hektar atau sekitar 25,04 % dari luas Pulau Jawa dan 1,70 % dari luas Indonesia. Secara administratif, Provinsi Jawa Tengah terbagi menjadi 29 kabupaten dan 6 kota (35 Kabupaten/Kota) dengan memiliki 565 Kecamatan, 662 Kelurahan, dan 7872 Desa. Apabila dilihat dari posisi geografisnya, Jawa Tengah berbatasan dengan:

Wilayah Utara	: Laut Jawa
Wilayah Selatan	: Provinsi DIY (Daerah Istimewa Yogyakarta) dan Samudera Hindia
Wilayah Barat	: Provinsi Jawa Barat
Wilayah Timur	: Provinsi Jawa Timur

Untuk lebih jelasnya dapat melihat gambar peta Provinsi Jawa Tengah dibawah ini.



Berdasarkan data dari BPS Jawa Tengah, pada tahun 2019 jumlah penduduk Provinsi Jawa Tengah yaitu sebanyak 34.718 ribu jiwa yang terdiri dari 17.212,46 ribu jiwa laki-laki dan 17.505,75 ribu jiwa perempuan. Apabila melihat proyeksi jumlah penduduk Jawa Tengah tahun 2018, penduduk mengalami pertumbuhan sebesar 0,78%. Sedangkan besarnya angka rasio jenis kelamin pada tahun 2019 penduduk laki-laki terhadap perempuan yakni sebesar 98,32. Dari 35 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah, Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk terbanyak berada pada Kota Semarang yakni sebesar 1.814.110 jiwa, kemudian disusul oleh Kabupaten Brebes yakni sebesar 1.809.096 jiwa, dan yang ketiga yakni Kabupaten Tegal sebesar 1.440.698 jiwa. Berdasarkan data kepadatan penduduk di Provinsi Jawa Tengah tahun 2015-2019 pada tabel dibawah, kepadatan penduduk pada tahun 2018 merupakan yang paling tinggi

yakni mencapai 1060 jiwa/km<sup>2</sup>. Kemudian kepadatan penduduk paling rendah yaitu pada tahun 2019 sebesar 987,26 jiwa/km<sup>2</sup>. Dari 35 kabupaten/kota di Jawa Tengah, kepadatan penduduk tertinggi yaitu berada di kota Surakarta dengan kepadatan mencapai 10.852,79 jiwa/ km<sup>2</sup> dan kepadatan penduduk terendah yaitu di Kabupaten Blora sebesar 459,79 jiwa/Km<sup>2</sup> (Jawa Tengah dalam Angka, 2020).

Tabel 4.1 Kependudukan di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015-2019

Tahun	Luas Wilayah	Jumlah Penduduk	Kepadatan Penduduk
	(Km <sup>2</sup> )	(Jiwa)	(Km <sup>2</sup> )
2015	32544,12	33774141	1038
2016	32544,12	34019095	1045
2017	32544,12	34257865	1053
2018	32544,12	34490835	1060
2019	32544,12	34718204	987,26

Sumber : Jawa Tengah dalam Angka, 2020

Menurut BPS Jawa Tengah, pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Tengah tahun 2019 yang ditunjukkan oleh laju pertumbuhan PDRB (atas dasar harga konstan 2010) sebesar 5,41% yakni lebih tinggi dibandingkan dengan tahun sebelumnya (2018) hanya 5,32%. Pada pertumbuhan riil sektoral, sektor yang mengalami pertumbuhan paling tinggi dicapai oleh sektor informasi dan komunikasi (11,62%), tetapi kontribusinya terhadap PDRB hanya sebesar 3,64%. Kemudian pertumbuhan terendah yakni pada sektor pertanian, kehutanan dan perikanan (1,36%). Sektor yang memberikan sumbangan tertinggi terhadap ekonomi Jawa Tengah adalah sektor industri pengolahan yakni sebesar 34,42%, dengan pertumbuhan sebesar 5,19%. Sektor yang juga dominan memberikan sumbangan bagi perekonomian Jawa Tengah yakni sektor perdagangan besar dan

eceran; reparasi mobil dan sepeda motor sebesar 13,74%, dengan pertumbuhan riil sebesar 5,98%.

Realisasi PAD (Pendapatan Asli Daerah) tahun anggaran 2019 terhimpun sebesar 14,11 triliun rupiah, naik 2,92% dibandingkan dengan tahun anggaran 2018. Pajak daerah memberikan kontribusi paling tinggi yaitu 11,71 triliun rupiah atau sebesar 82,98% dari total PAD. Sejalan dengan realisasi PAD, realisasi dana perimbangan tahun anggaran 2019 adalah sebesar 11.79 triliun rupiah atau naik 7,87% dari tahun anggaran sebelumnya (Jawa Tengah dalam Angka, 2020).

## B. Analisis Deskriptif

Tabel 4.2 Hasil Analisis Statistik Deskriptif

	Kemiskinan	UMK	Pendidikan	Belanja Bantuan Sosial	Akses Sanitasi Layak
Mean	11.91606	1.571169	7.562400	12.31410	72.43560
Median	11.67000	1.542000	7.220000	9.864200	77.04000
Maximum	21.45000	2.498587	10.54000	51.84219	97.47000
Minimum	3.980000	1.100000	5.880000	0.000000	9.240000
Std. Dev.	4.025201	0.378427	1.220264	10.61918	18.79569

Pada Tabel 4.2 diatas menunjukkan data penelitian di 35 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah. Observasi yang dilakukan sebanyak 175 dalam kurun waktu penelitian 2015-2019, dapat dilihat bahwa untuk kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah rata-rata sebesar 11,91606 persen dengan standar deviasi 4,025201 persen. Nilai kemiskinan terendah (*minimum*) adalah sebesar 3,98 persen pada tahun 2019, sedangkan nilai kemiskinan tertinggi (*maximum*) adalah sebesar 21,45 persen pada tahun 2015.

Nilai rata-rata dari variabel UMK adalah sebesar Rp 1.571.169,00 Nilai UMK terendah (minimum) yaitu sebesar Rp.1.100.000,00 pada tahun 2015 dan untuk UMK yang tertinggi (maximum) yaitu sebesar Rp.2.498.587,53 pada tahun 2019. Selanjutnya nilai rata-rata dari variabel pendidikan (rata-rata lama sekolah) adalah sebesar 7,56 tahun. Sedangkan untuk pendidikan (rata-rata lama sekolah) terendah (minimum) dengan nilai sebesar 5,88 tahun pada tahun 2015 dan untuk pendidikan (rata-rata lama sekolah) tertinggi (maximum) dengan nilai sebesar 10,54 tahun pada tahun 2019.

Kemudian nilai rata-rata dari variabel belanja bantuan sosial adalah sebesar Rp.12,31410 milyar. Sedangkan nilai belanja bantuan sosial terendah (minimum) dengan nilai Rp.0 dan untuk belanja bantuan sosial tertinggi (maximum) dengan nilai sebesar Rp.51,84219 milyar. Selanjutnya nilai rata-rata dari variabel akses sanitasi layak adalah sebesar 72,43 persen. Nilai akses sanitasi layak (minimum) dengan nilai 97,47 persen pada tahun 2018 dan untuk nilai akses sanitasi layak tertinggi (maximum) dengan nilai sebesar 9,24 persen pada tahun 2018.

## 1. Kemiskinan

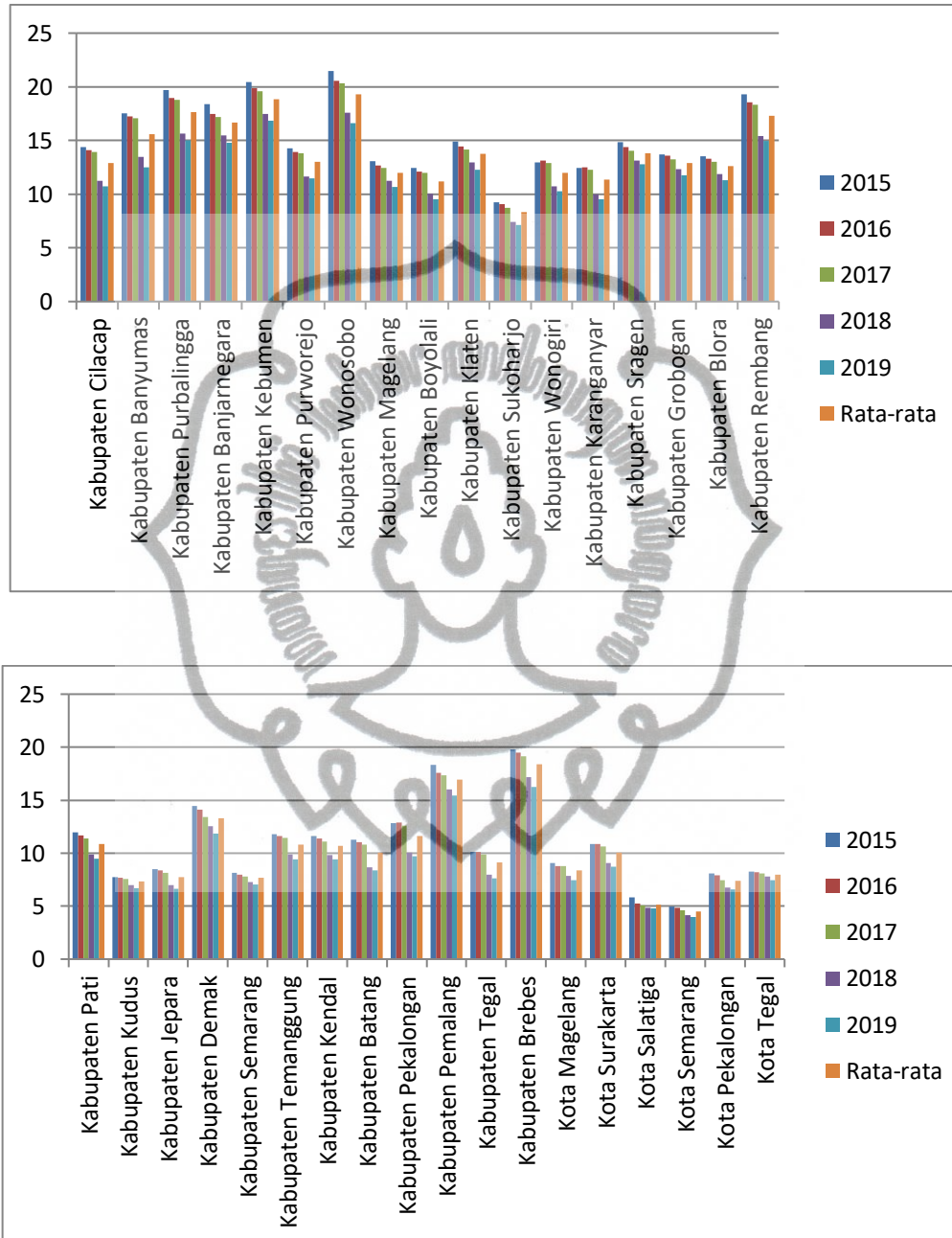
Kemiskinan merupakan ketidakmampuan seseorang untuk memenuhi standar hidup minimum seperti pemenuhan kebutuhan sandang, pangan, papan, fasilitas pendidikan, kesehatan, fasilitas air bersih, sanitasi dan lain sebagainya sehingga menimbulkan kesengsaraan hidup. Menurut pendapat Robert Chambers dalam Bappenas (2018), kemiskinan adalah suatu pengelompokan dari berbagai kondisi yang kurang menguntungkan seperti ketidakberdayaan, keterisolasian,

kelemahan fisik, kerentanan terhadap guncangan, dan kemiskinan itu sendiri. Dimana kondisi tersebut saling berkaitan satu sama lain, dan dapat mengakibatkan seseorang terperangkap bahkan sulit keluar dari kondisi kemiskinan.

Berdasarkan data kemiskinan pada tabel menunjukkan bahwa persentase penduduk miskin di Provinsi Jawa Tengah antara tahun 2015-2019 paling tinggi yakni berada di Kabupaten Wonosobo yaitu sebesar 21,45 persen pada tahun 2015. Kemudian Kabupaten/Kota yang persentase penduduk miskinnya paling rendah adalah Kota Semarang yakni pada tahun 2019 hanya sebesar 3,98 persen. Persentase rata-rata kemiskinan tertinggi di Provinsi Jawa Tengah berada di Kabupaten Wonosobo sebesar 19,30 persen, tertinggi kedua yakni Kabupaten Kebumen sebesar 18,84 persen dan diikuti Kabupaten Brebes sebesar 18,36 persen. Sedangkan persentase rata-rata kemiskinan terendah adalah Kota Semarang sebesar 4,51 persen.



Grafik 4.1 Data Kemiskinan Provinsi Jawa Tengah (%) Tahun 2015-2019



Sumber : BPS Jawa Tengah, 2020

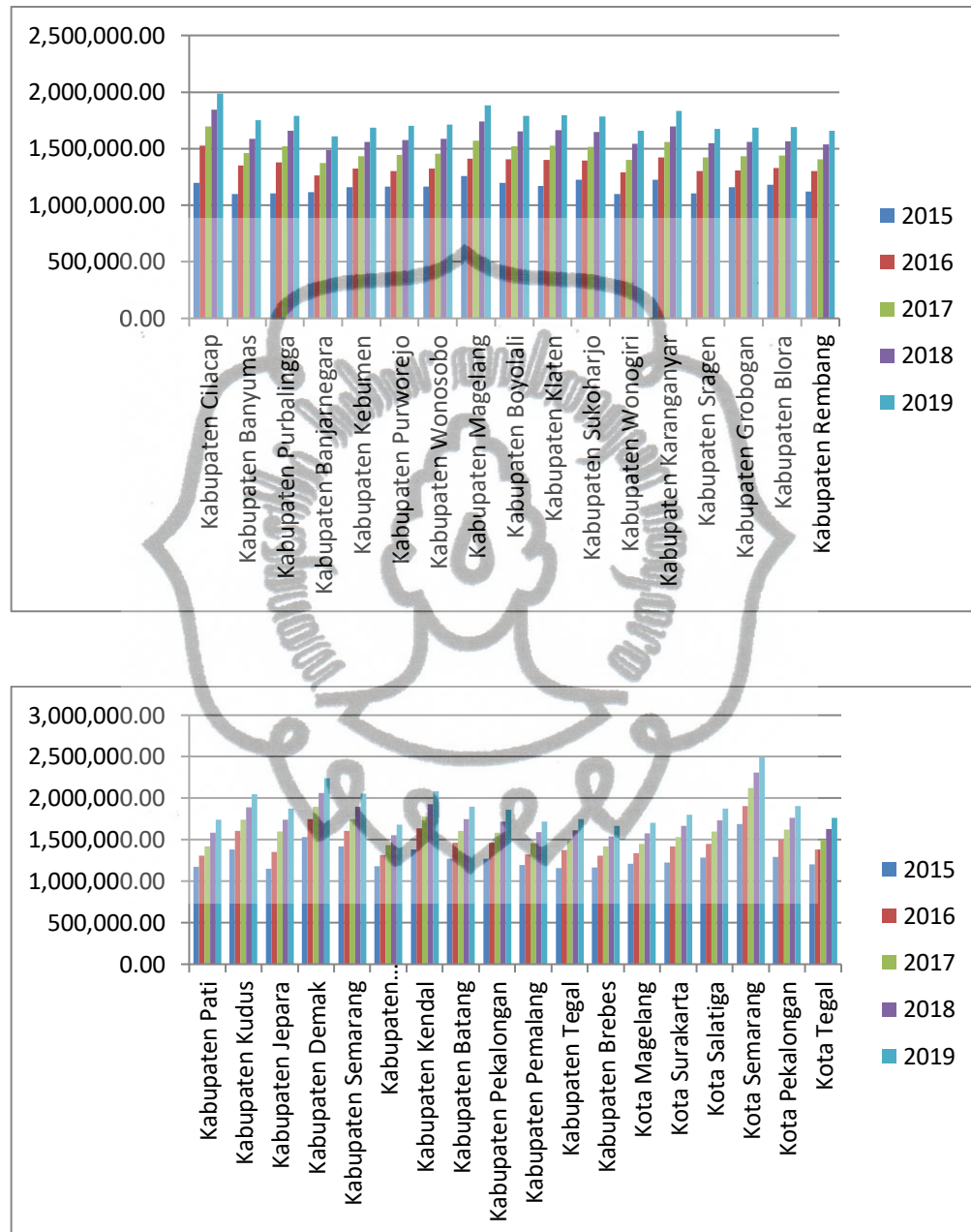
## 2. Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK)

Menurut Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi nomor 7 tahun 2013, penetapan upah minimum oleh Gubernur bertujuan sebagai jaring pengaman dan ditetapkan dengan memperhatikan kebutuhan hidup yang layak (KHL). Upah Minimum Kabupaten/Kota yang disingkat UMK adalah Upah Minimum yang berlaku di wilayah kabupaten/kota. Berdasarkan PP No. 78 Tahun 2015 pasal 46, upah minimum Kabupaten/Kota harus lebih besar dari upah minimum provinsi pada provinsi yang bersangkutan.

Berdasarkan data Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) pada tabel menunjukkan bahwa tingkat UMK di Provinsi Jawa Tengah pada rentang tahun 2015-2019 paling tinggi berada di Kota Semarang yakni sebesar Rp.2.498.587,53 pada tahun 2019. Kemudian Kabupaten/Kota yang tingkat UMK nya paling rendah adalah Kabupaten Banyumas yakni pada tahun 2015 hanya sebesar Rp.1.100.000,00. Pada tahun 2019, tiga daerah yang memiliki tingkat UMK tertinggi yakni Kota Semarang sebesar Rp.2.498.587,53, diikuti Kabupaten Demak sebesar Rp.2.240.000,00, dan peringkat ketiga yakni Kabupaten Kendal sebesar Rp.2.084.393,48. Sedangkan daerah dengan tingkat UMK terendah yakni Kabupaten Banjarnegara sebesar Rp.1.610.000,00, Kabupaten Wonogiri Rp.1.655.000,00 dan Kabupaten Brebes sebesar Rp.1.665.850,00.



Grafik 4.2 Upah Minimum Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah (Rp)  
Tahun 2015-2019



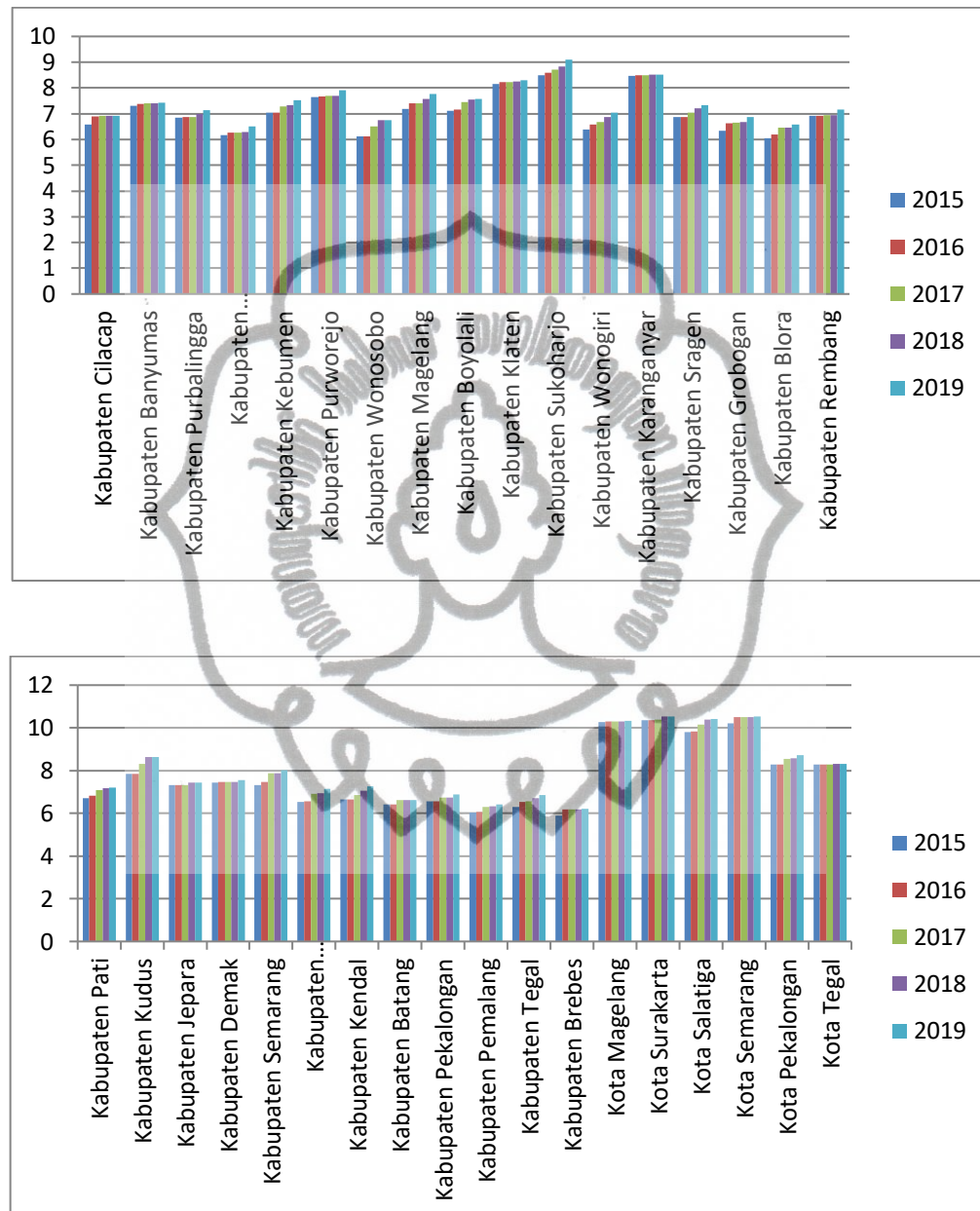
Sumber : BPS Jawa Tengah, 2020

### 3. Pendidikan (Rata-Rata Lama Sekolah)

Pendidikan merupakan pionir dalam pembangunan manusia, karena pendidikan memberikan wawasan, pengetahuan dan keterampilan yang dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia serta meningkatkan produktivitas kerja. Sehingga pendidikan dapat mendorong peningkatan penghasilan seseorang dan tercapai kesejahteraan yang dapat menurunkan tingkat kemiskinan. Pada dasarnya kondisi kemiskinan dapat mengakibatkan kebodohan begitu juga sebaliknya, kebodohan dapat mengakibatkan seseorang terperangkap dalam kemiskinan. Salah satu indikator pendidikan yakni Rata-Rata Lama Sekolah (RLS).

Berdasarkan data rata-rata lama sekolah pada tabel menunjukkan bahwa tingkat rata-rata lama sekolah dalam tahun di Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2015-2019 paling tinggi yakni berada di Kota Surakarta yakni sebesar 10,54 tahun pada tahun 2019. Kemudian Kabupaten/Kota dengan tingkat rata-rata lama sekolah paling rendah adalah Kabupaten Cilacap yakni pada tahun 2015 hanya sebesar 5,88 tahun. Pada tahun 2019 Kota Surakarta, Kota Semarang dan Kota Salatiga merupakan tiga daerah yang memiliki tingkat rata-rata lama sekolah paling tinggi di Provinsi Jawa Tengah yakni masing-masing sebesar 10,54, 10,52 dan 10,41. Sementara tiga daerah dengan tingkat rata-rata lama sekolah terendah di provinsi Jawa Tengah adalah Kabupaten Brebes sebesar 6,2, Kabupaten Pemasang sebesar 6,4, dan Kabupaten Banjarnegara sebesar 6,5.

Grafik 4.3 Data Pendidikan (Rata-Rata Lama Sekolah) Provinsi Jawa Tengah (%)  
Tahun 2015-2019



Sumber : BPS Jawa Tengah, 2020

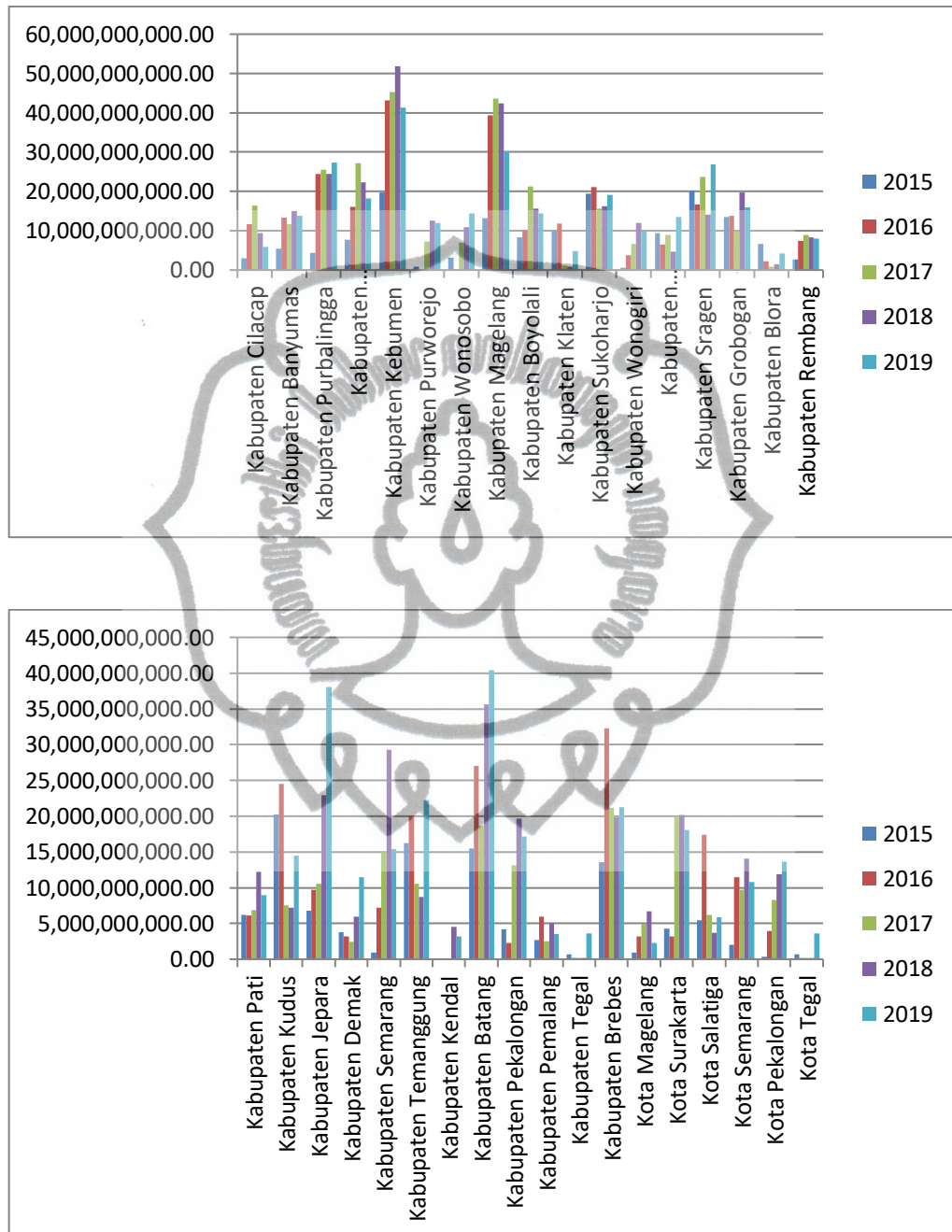
#### 4. Belanja Bantuan Sosial

Belanja bantuan sosial merupakan pengeluaran berupa transfer uang, barang atau jasa oleh pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat miskin dari terjadinya risiko sosial dimana bantuan yang diberikan tersebut bersifat selektif agar tepat sasaran sehingga dapat menurunkan tingkat kemiskinan. Masyarakat yang terpilih dan layak mendapatkan bantuan sosial diharapkan menggunakan bantuan tersebut untuk sesuatu yang bermanfaat sehingga dapat mendorong peningkatan kesejahteraan hidupnya. Untuk mendukung pemerataan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi tingkat kesenjangan sosial, pemerintah tiap tahunnya mengalokasikan belanja bantuan sosial, mengingat setiap daerah tidak terlepas dari adanya masyarakat miskin.

Berdasarkan data belanja bantuan sosial di Provinsi Jawa Tengah bahwa realisasi belanja bantuan sosial sepanjang tahun 2015-2019 terus mengalami kenaikan. Pada tahun 2015 realisasi belanja bantuan sosial di Provinsi Jawa Tengah yaitu sebesar Rp 252.882.413.546,00. Kemudian pada tahun 2016 meningkat menjadi Rp 419.621.118.467,00. Pada tahun berikutnya kembali naik yakni tahun 2017 sebesar Rp 438.542.851.032,00. Selanjutnya pada tahun 2018 sebesar Rp 509.821.193.662,00 dan tahun 2019 sebesar 534.100.599.200,00.

Pada tahun 2019 menunjukkan bahwa daerah yang mengeluarkan belanja untuk bantuan sosial paling banyak yakni Kabupaten Kebumen sebesar Rp. 41,392,080,465.00. Kemudian Kabupaten/Kota yang mengeluarkan belanja bantuan sosial paling rendah adalah Kota Kendal yakni sebesar Rp.3.150.000.000.

Grafik 4.4 Data Belanja Bantuan Sosial Provinsi Jawa Tengah (Rp)  
Tahun 2015-2019



Sumber : BPS Jawa Tengah, 2020

## 5. Akses Sanitasi Layak

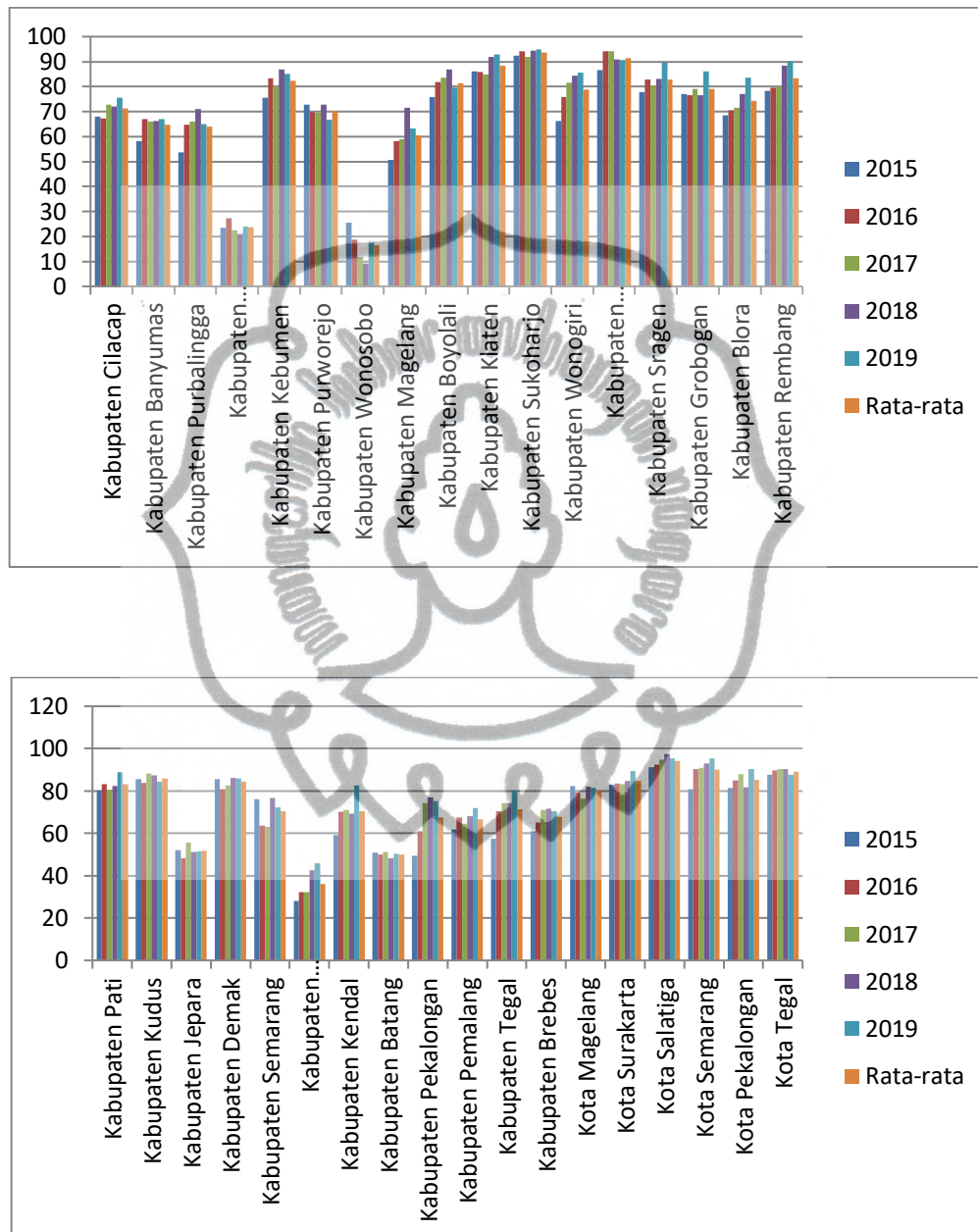
Akses sanitasi layak sudah semestinya menjadi perhatian penting bagi pemerintah. Pentingnya pembangunan akses sanitasi layak juga merupakan perwujudan tujuan SDG's. Pembangunan dan perbaikan sanitasi secara tidak langsung dapat mengurangi tingkat kemiskinan. Sebagaimana dengan adanya pengurangan tingkat kemiskinan, hal ini menunjukkan bahwa masyarakat mampu mengalokasikan pendapatan untuk membangun dan memperbaiki akses sanitasi (Rizki, B & S. Saleh, 2007).

Berdasarkan data kemiskinan pada tabel menunjukkan bahwa persentase rumah tangga yang memiliki akses sanitasi layak di Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2015-2019 paling tinggi yakni berada di Kota Salatiga yaitu sebesar 97,47 persen pada tahun 2018. Kemudian Kabupaten/Kota dengan persentase rumah tangga yang memiliki akses sanitasi layak paling rendah adalah Kabupaten Wonosobo yakni pada tahun 2018 hanya sebesar 9,24 persen. Rata-rata persentase rumah tangga yang memiliki akses sanitasi layak di Provinsi Jawa Tengah berada di Kota Salatiga sebesar 94,23 persen, tertinggi kedua yakni Kabupaten Sukoharjo sebesar 93,54 persen dan diikuti Kabupaten Karanganyar sebesar 91,36 persen. Sedangkan rata-rata persentase rumah tangga yang memiliki akses sanitasi layak terendah adalah Kabupaten Wonosobo sebesar 16,46 persen.



Grafik 4.5 Data Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Sanitasi Layak

Provinsi Jawa Tengah (%) Tahun 2015-2019



Sumber : BPS Jawa Tengah, 2020

## C. Hasil Analisis Data

### 1. Model Regresi Data Panel

Dalam memilih model regresi dengan data panel, terdapat beberapa langkah uji spesifikasi model guna memperoleh model regresi data panel yang paling tepat digunakan. Terdapat tiga uji spesifikasi model diantaranya yakni *common effect model*, *fixed effect model*, dan *random effect model*. Hasil dari pengujian regresi data panel menggunakan CEM (*Common Effect Model*), FEM (*Fixed Effect Model*), dan REM (*Random Effect Model*) adalah sebagai berikut:

Tabel 4.3 Hasil Regresi CEM, FEM dan REM

Variable	Common Effect		Fixed Effect		Random Effect	
	Koefisien	(prob.)	Koefisien	(prob.)	Koefisien	(prob.)
C	29.46897	(0.0000)	38.91191	(0.0000)	33.83738	(0.0000)
Umk	-2.002174	(0.0016)	-0.550236	(0.0626)	-0.813267	(0.0033)
Pendidikan	-1.7907767	(0.0000)	-2.995915	(0.0000)	-2.28636	(0.0000)
Belanja Bantuan Sosial	0.03462	(0.1167)	-0.036048	(0.0052)	-0.035367	(0.0043)
Akses Sanitasi Layak	-0.017823	(0.2272)	-0.041846	(0.0172)	-0.040279	(0.0096)
R-squared	0.444558		0.960802		0.485256	
Adjusted R-squared	0.431489		0.949850		0.473144	
F-statistic	34.01564		87.72534		40.06526	
Prob(F-statistic)	0.000000		0.000000		0.000000	
Observation	175		175		175	

Sumber : olah data views 9, 2020

## 2. Pemilihan Model Terbaik

Pada penelitian ini untuk memilih model yang terbaik, untuk itu dilakukan tiga pengujian model yakni Uji Chow, Uji Hausman dan Uji Lagrange Multiplier. Uji Chow digunakan untuk menentukan model regresi mana yang lebih baik diantara common effect model dengan fixed effect model, kemudian Uji Hausman digunakan untuk menentukan model regresi mana yang lebih baik diantara fixed effect model dengan random effect model, sedangkan Uji Lagrange Multiplier digunakan untuk menentukan model regresi mana yang lebih baik diantara common effect model dengan random effect model.

### a. Uji Chow

Uji chow dilakukan untuk memilih model mana yang lebih baik, diantara common effect dengan fixed effect model. Jika nilai probabilitas pada cross-section  $F < \text{tingkat signifikansi } \alpha = 0,05 \text{ (5\%)}$ , maka  $H_1$  diterima. Sebaliknya jika nilai probabilitas cross-section  $F > \text{dari tingkat signifikansi } \alpha = 0,05 \text{ (5\%)}$ , maka  $H_0$  diterima. Dengan hipotesis sebagai berikut:

$H_0$ : Memilih Common Effect Model

$H_1$ : Memilih Fixed Effect Model

Tabel 4.4 Hasil Uji Chow

Prob. Cross-section F
0,0000

Sumber: olah data eviews 9, 2020

Hasil Uji Chow menunjukkan nilai Probabilitas pada Cross-Section F yakni sebesar 0.0000. Dengan menggunakan  $\alpha = 0,05$  (5%), nilai Probabilitas Cross-Section  $F < \alpha$  ( $0.0000 < 0.05$ ). Maka  $H_0$  ditolak, dan  $H_1$  diterima, sehingga model yang sebaiknya digunakan yakni Fixed Effect Model (FEM).

#### b. Uji Haussman

Uji Haussman digunakan untuk memilih model mana yang terbaik, antara Fixed Effect dengan Random Effect Model. Jika nilai probabilitas cross-section random  $<$  dari tingkat signifikansi  $\alpha = 0,05$  (5%), maka  $H_1$  diterima. Sebaliknya jika nilai probabilitas cross-section random  $>$  dari tingkat signifikansi  $\alpha = 0,05$  (5%), maka  $H_0$  diterima. Dengan hipotesis sebagai berikut:

$H_0$ : Memilih Random Effect Model

$H_1$ : Memilih Fixed Effect Model

Tabel 4.5 Hasil Uji Hausman

<b>Prob. Cross-section random</b>
0,0842

Sumber: olah data eviews 9, 2020

Hasil Uji Hausman menunjukkan nilai probabilitas pada cross-section random yakni sebesar 0.0842. Dengan menggunakan  $\alpha = 0,05$  (5%), nilai probabilitas cross-section random  $> \alpha$  ( $0.0842 > 0.05$ ). Maka  $H_0$  diterima,

sehingga model yang sebaiknya digunakan yakni Random Effect Model (REM).

### c. Uji Lagrange Multiplier

Uji Lagrange Multiplier digunakan untuk memilih model mana yang terbaik, antara Common Effect dengan Random Effect Model. Jika nilai probabilitas Breusch-Pagan < dari tingkat signifikansi  $\alpha = 0,05$  (5%), maka  $H_1$  diterima. Sebaliknya jika nilai probabilitas Breusch-Pagan > dari tingkat signifikansi  $\alpha = 0,05$  (5%), maka  $H_0$  diterima. Dengan hipotesis sebagai berikut:

$H_0$ : Memilih Common Effect Model

$H_1$ : Memilih Random Effect Model

Tabel 4.6 Hasil Uji Lagrange Multiplier

Prob. Breusch-Pagan
0,0000

Sumber: olah data eviews 9, 2020

Hasil Uji Lagrange Multiplier menunjukkan nilai probabilitas atau Breusch-Pagan yakni sebesar 0.0000. Dengan menggunakan  $\alpha = 0,05$  (5%), nilai probabilitas cross-section one sided <  $\alpha$  ( $0.0000 < 0.05$ ). Maka  $H_1$  diterima, sehingga model yang sebaiknya digunakan yakni Random Effect Model (REM).

Berdasarkan hasil dari ketiga uji model yang telah dilakukan, maka model regresi yang terbaik untuk dipakai dalam menganalisis pengaruh

upah minimum Kabupaten/Kota, pendidikan, belanja bantuan sosial, dan akses sanitasi layak terhadap kemiskinan Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2015-2019 yakni menggunakan Random Effect Model (REM).

### 3. Uji Asumsi Klasik

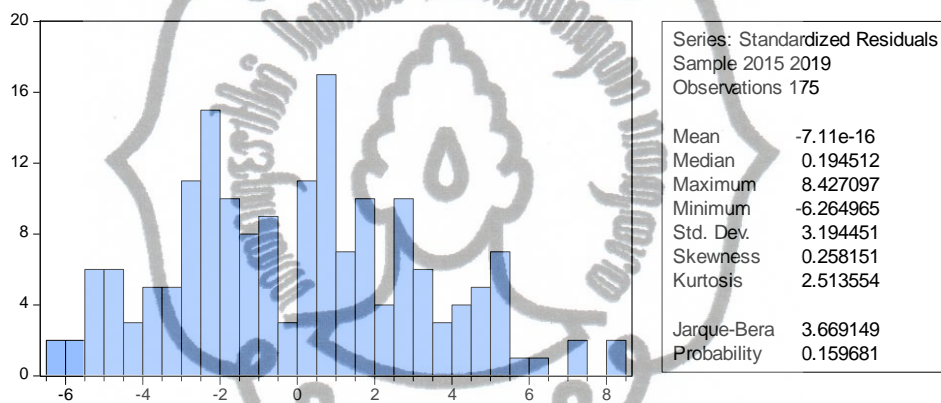
Uji asumsi klasik yang digunakan dalam penelitian ini yakni uji normalitas dan uji multikolinearitas. Karena model yang digunakan dalam penelitian ini adalah Random Effect Model, maka penelitian ini tidak menggunakan uji heteroskedastisitas, dimana Random Effect Model menggunakan pendekatan Generalized Least Square (GLS) yang dapat menghilangkan masalah heteroskedastisitas (Widarjono, 2009). GLS merupakan bentuk estimasi yang dibuat untuk mengatasi sifat heteroskedastisitas, serta memiliki kemampuan untuk mempertahankan sifat efisiensi estimatornya tanpa harus kehilangan sifat unbiased dan konsistensinya dengan estimator (Setyawan dkk, 2019). Metode GLS telah memperhitungkan heterogenitas yang terdapat pada variabel independen secara eksplisit, sehingga metode ini mampu menghasilkan estimator yang memenuhi kriteria BLUE (Gujarati, 2004). Menurut Basuki (2014) uji autokorelasi pada dasarnya hanya terjadi pada data yang bersifat time series. Untuk itu, melakukan uji autokorelasi pada data non time series (data panel atau cross section) semata akan bersifat sia-sia atau tidak berarti. Jadi disimpulkan bahwa pada regresi data panel tidak semua uji asumsi klasik model OLS dipakai.



### a. Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel dependen dan variabel independen keduanya berdistribusi normal atau tidak. Pengambilan keputusan dengan Jarque-Bera test yaitu apabila nilai *probability*  $> \alpha = 0,05$  (5%), maka variabel-variabel tersebut terdistribusi normal.

Grafik 4.6 Hasil Uji Normalitas



Sumber: olah data views 9, 2020

Berdasarkan hasil uji normalitas, menunjukkan bahwa *probabilitas*  $> 5\%$  yakni  $0,159681 > 0.05$ . Sehingga disimpulkan bahwa data terdistribusi normal.

### b. Uji Multikolinearitas

Uji Multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi terdapat korelasi antar variabel bebas atau tidak. Menurut (Gujarati, 2013) jika koefisien korelasi antarvariabel bebas lebih dari 0,8 maka dapat disimpulkan bahwa model mengalami masalah multikolinearitas.

*commit to user*

Sebaliknya, jika koefisien korelasi kurang dari 0,8 maka model bebas dari masalah multikolinearitas.

Tabel 4.7 Hasil Uji Multikolinearitas

Variabel	UMK	Pendidikan	Belanja Bantuan Sosial	Akses Sanitasi Layak
UMK	1.000000	0.173521	0.068744	0.164053
Pendidikan	0.173521	1.000000	-0.099183	0.543831
Belanja Bantuan Sosial	0.068744	-0.099183	1.000000	-0.126441
Akses Sanitasi Layak	0.164053	0.543831	-0.126441	1.000000

Sumber: olah data eviews 9, 2020

Dari hasil uji yang dilakukan, semua koefisien korelasi kurang dari 0,8. Sehingga dapat disimpulkan bahwa model tersebut bebas dari masalah multikolinearitas.

#### 4. Uji Statistik

Dalam penelitian ini, uji statistik yang digunakan yakni uji signifikansi secara bersama-sama atau simultan (Uji F), uji signifikansi parameter individu atau parsial (Uji t) dan uji koefisien determinasi (Uji R<sup>2</sup>).

##### a. Uji F (Uji Simultan)

Uji F digunakan untuk mengetahui apakah variabel-variabel independen secara simultan berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Dengan taraf signifikan  $\alpha = 0,05$  (5%) disimpulkan bahwa jika nilai F-hitung > nilai F-tabel, maka secara simultan semua variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Sebaliknya, Jika nilai

F-hitung < nilai F-tabel, maka secara simultan semua variabel independen tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

Tabel 4.8 Hasil Uji F

F-statistic	40.06526
Prob (F statistic)	0.000000

Sumber: olah data eviews 9, 2020

Berdasarkan hasil analisis, diperoleh nilai F-hitung sebesar 40.06526 dan nilai probabilitas F sebesar 0.000000. Dalam taraf signifikansi 5%, dengan degree of freedom for numerator (dfn) = 4 (k-1 = 5-1) dan degree of freedom for denominator (dfd) = 180 (n + k = 175 + 5) diperoleh F tabel sebesar 2.42. Sehingga disimpulkan bahwa variabel independen secara bersama-sama (simultan) mempengaruhi variabel dependen (F-hitung > F-tabel) atau  $40.06526 > 2.42$ , maka uji F signifikan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa seluruh variabel bebas secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat. Variabel Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), pendidikan, belanja bantuan sosial dan akses sanitasi layak secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2015-2019.

#### b. Uji t (Uji Parsial)

Uji t digunakan untuk mengetahui apakah variabel-variabel independen secara individu atau parsial berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

Tabel 4.9 Hasil Uji t

Variabel	Coefficient	t-statistic	Prob.
C	33.83738	14.45995	0.0000
UMK	-0.813267	-2.978109	0.0033
Pendidikan	-2.286360	-6.505661	0.0000
Belanja Bantuan Sosial	-0.035367	-2.892793	0.0043
Akses Sanitasi Layak	-0.040279	-2.618331	0.0096

Sumber: olah data eviews 9, 2020

#### 1. Pengujian Terhadap Variabel UMK

Berdasarkan hasil diatas, variabel UMK memiliki nilai koefisien sebesar -0.813267 dengan nilai t-hitung -2.978109 dan nilai probabilitas sebesar 0.0033. Nilai probabilitas yang dihasilkan kurang dari  $\alpha = 5\%$  ( $0.0033 < 0.05$ ) sehingga secara statistik variabel UMK berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan Kab/Kota di Provinsi Jawa Tengah.

#### 2. Pengujian Terhadap Variabel Pendidikan (Rata-rata lama sekolah)

Berdasarkan hasil diatas, variabel pendidikan (rata-rata lama sekolah) memiliki nilai koefisien sebesar -2.286360 dengan nilai t-hitung -6.505661 dan nilai probabilitas sebesar 0.0000. Nilai probabilitas yang dihasilkan kurang dari  $\alpha = 5\%$  ( $0.0000 < 0.05$ ) sehingga secara statistik variabel pendidikan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan Kab/Kota di Provinsi Jawa Tengah.

### 3. Pengujian Terhadap Variabel Belanja Bantuan Sosial

Berdasarkan hasil diatas, variabel belanja bantuan sosial memiliki nilai koefisien sebesar -0.035367 dengan nilai t-hitung -2.892793 dan nilai probabilitas sebesar 0.0043. Nilai probabilitas yang dihasilkan kurang dari  $\alpha = 5\%$  ( $0.0043 < 0.05$ ) sehingga secara statistik variabel belanja bantuan sosial berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan Kab/Kota di Provinsi Jawa Tengah.

### 4. Pengujian Terhadap Variabel Akses Sanitasi Layak

Berdasarkan hasil diatas, variabel akses sanitasi layak memiliki nilai koefisien sebesar -0.040279 dengan nilai t-hitung -2.618331 dan nilai probabilitas sebesar 0.0096. Nilai probabilitas yang dihasilkan kurang dari  $\alpha = 5\%$  ( $0.0096 < 0.05$ ) sehingga secara statistik variabel akses sanitasi layak berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan Kab/Kota di Provinsi Jawa Tengah.

#### c. Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

Uji koefisien determinasi ( $R^2$ ) pada intinya bertujuan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan suatu model dalam menjelaskan variasi variabel dependen.

Tabel 4.10 Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

R-squared	0.485256
Adjusted R-squared	0.473144

Sumber: olah data *evIEWS* 9, 2020

Berdasarkan hasil pengolahan data diperoleh nilai koefisien determinasi atau ( $R^2$ ) adjusted sebesar 0.473144 yang berarti 47.3% kemiskinan Kab/kota di Provinsi Jawa Tengah secara bersama-sama dapat dijelaskan oleh variasi dari keempat variabel independen yakni UMK, Pendidikan, Belanja Bantuan Sosial dan Akses Sanitasi Layak sedangkan sisanya 52.7% persen dijelaskan oleh variabel lain di luar model yang tidak termasuk dalam penelitian. Yakni banyak sekali variabel lain yang mempengaruhi kemiskinan namun tidak dimasukkan dalam penelitian ini. Seperti penelitian yang dilakukan oleh Andhykha dkk (2018) dan Fadlillah dkk (2016) bahwa variabel tingkat pengangguran berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan serta variabel IPM berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah. Selanjutnya berdasarkan penelitian Bintang & Woyanti (2018) variabel tingkat harapan hidup memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Jawa Tengah. Kemudian penelitian Febriaty & Nurwani (2017) bahwa variabel pendapatan per kapita dan gini ratio berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah. Serta penelitian yang dilakukan oleh Paramita & Purbadharmaja (2015) bahwa secara langsung variabel pertumbuhan ekonomi dan investasi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan.



#### D. Pembahasan

Hasil pengolahan data dalam penelitian ini menggunakan program evIEWS 9, diketahui variabel dependennya yakni kemiskinan, kemudian variabel independennya adalah Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), pendidikan, belanja bantuan sosial, dan akses sanitasi layak. Berdasarkan hasil uji spesifikasi model yang telah dilakukan, dalam penelitian ini model yang terbaik digunakan yakni Random Effect Model (REM). Hasil estimasi data panel menggunakan REM (Random Effect Model) adalah sebagai berikut:

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	33.83738	2.340076	14.45995	0.0000
UMK	-0.81327	0.273082	-2.97811	0.0033
Pendidikan	-2.28636	0.351442	-6.50566	0.0000
Belanja Bantuan Sosial	-0.03537	0.012226	-2.89279	0.0043
Akses Sanitasi Layak	-0.04028	0.015384	-2.61833	0.0096

Sumber: olah data evIEWS 9, 2020

$$\text{KEM} = 33,83738 - 0,813267 (\text{UMK}) - 2,286360 (\text{PEN}) - 0,035367 (\text{BBS}) - 0,040279 (\text{ASL}) + e_{it}$$

Interpretasi dari hasil regresi data panel pada penelitian berjudul pengaruh upah minimum Kabupaten/Kota, pendidikan, belanja bantuan sosial, dan akses sanitasi layak terhadap kemiskinan Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2015-2019 adalah sebagai berikut:

##### 1. Pengaruh Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) terhadap Kemiskinan

Berdasarkan hasil analisis data diatas, dapat dijelaskan bahwa variabel Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap variabel kemiskinan dengan nilai koefisien negatif sebesar -0.813267.

Artinya apabila terjadi peningkatan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) sebesar satu juta rupiah, maka kemiskinan akan menurun sebesar 0.813267 persen. Hal ini menunjukkan bahwa Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) memiliki pengaruh terhadap kemiskinan Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah dan memiliki hubungan negatif. Hasil ini sejalan dengan hipotesis yang mengatakan bahwa Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan.

Hasil tersebut sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Safitri dkk (2020), Lutfi dkk (2016) sebagaimana hasil penelitiannya menyatakan bahwa terdapat hubungan negatif dan signifikan antara Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) dengan jumlah kemiskinan. Prinsip keadilan dalam pemberian upah harus diperhatikan, salah satu faktor terjadinya lingkaran kemiskinan disebabkan masih banyaknya masyarakat yang berpendapatan rendah sehingga tidak dapat mencukupi kebutuhan hidupnya. Oleh karena itu, apabila Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) meningkat, maka akan mendorong meningkatnya semangat kerja, serta dapat meningkatkan kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pokoknya sehari-hari sehingga tercapai kesejahteraan masyarakat. Hubungan tersebut menunjukan pentingnya penetapan upah minimum yang benar-benar mempertimbangkan kebutuhan hidup layak dengan memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi untuk menurunkan tingkat kemiskinan.

## 2. Pengaruh Pendidikan (Rata-rata Lama Sekolah) terhadap Kemiskinan

Berdasarkan hasil analisis data diatas, dapat dijelaskan bahwa variabel pendidikan yang diproksi dengan rata-rata lama sekolah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap variabel kemiskinan dengan nilai koefisien negatif sebesar - 2.286360. Artinya apabila terjadi peningkatan pendidikan satu tahun rata-rata lama sekolah, maka kemiskinan akan menurun sebesar 2.286360 persen. Hal ini menunjukkan bahwa pendidikan memiliki pengaruh terhadap kemiskinan Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah dan memiliki hubungan negatif. Hasil ini sejalan dengan hipotesis yang mengatakan bahwa pendidikan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan.

Hasil tersebut sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Pratiwi & Sutrisna (2014), Rizqiana (2019) sebagaimana hasil penelitiannya menyatakan bahwa, terdapat hubungan negatif dan signifikan antara variabel pendidikan yang diproksi dengan rata-rata lama sekolah terhadap kemiskinan. Hal ini serupa dengan penelitian Trisnu & Sudiana (2019) sebagaimana hasil penelitiannya menyatakan bahwa terdapat hubungan negatif dan signifikan antara pendidikan dengan tingkat kemiskinan. Sarbini & Lina (2011) mengatakan bahwa dengan adanya peningkatan kualitas SDM melalui pendidikan masyarakat dapat keluar dari keterbelakangan dan kemiskinan. Hubungan tersebut mengindikasikan bahwa pendidikan amatlah penting, serta dapat menyelamatkan diri dari kemiskinan. Salah satu mekanisme pengentasan kemiskinan yakni dengan pengembangan modal manusia (*human capital*) khususnya pendidikan dan kesehatan (Ustama, 2009). Dengan adanya pendidikan, seseorang menjadi terdidik serta memiliki

kualitas sumber daya manusia yang tinggi sehingga dapat meningkatkan produktivitas kerja, semakin tinggi suatu produktivitas tenaga kerja, semakin besar pula pendapatan yang akan diterima dan dapat mengurangi kemiskinan. Pendidikan yang tinggi dapat meningkatkan kualitas hidup dan mengurangi kesenjangan sosial sehingga tercapai kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian pendidikan diyakini mampu memutus rantai kemiskinan.

### 3. Pengaruh Belanja Bantuan Sosial terhadap Kemiskinan

Berdasarkan hasil analisis data diatas, dapat dijelaskan bahwa variabel belanja bantuan sosial berpengaruh negatif dan signifikan terhadap variabel kemiskinan dengan nilai koefisien negatif sebesar  $-0.035367$ . Artinya apabila terjadi peningkatan belanja bantuan sosial sebesar satu milyar rupiah, maka kemiskinan akan menurun sebesar  $0.035367$  persen. Hal ini menunjukkan bahwa belanja bantuan sosial memiliki pengaruh terhadap kemiskinan Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah dan memiliki hubungan negatif. Hasil ini sejalan dengan hipotesis yang mengatakan bahwa belanja bantuan sosial berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan.

Hasil tersebut sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Rarun dkk (2018) sebagaimana hasil penelitiannya menyatakan bahwa terdapat hubungan negatif dan signifikan antara belanja bantuan sosial dengan kemiskinan. Pada dasarnya belanja bantuan sosial yang dikeluarkan pemerintah bertujuan untuk meningkatkan kemampuan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat miskin. Belanja bantuan sosial harus dilakukan secara selektif serta disalurkan dengan tepat sasaran, sehingga dapat mengurangi tingkat kemiskinan.

#### 4. Pengaruh Akses Sanitasi Layak terhadap Kemiskinan

Berdasarkan hasil analisis data diatas, dapat dijelaskan bahwa variabel akses sanitasi layak berpengaruh negatif dan signifikan terhadap variabel kemiskinan dengan nilai koefisien negatif sebesar  $-0.040279$ . Artinya apabila terjadi peningkatan akses sanitasi layak sebesar satu persen, maka kemiskinan akan menurun sebesar  $0.040279$  persen. Hal ini menunjukkan bahwa akses sanitasi layak memiliki pengaruh terhadap kemiskinan Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah dan memiliki hubungan negatif. Hasil ini sejalan dengan hipotesis yang mengatakan bahwa akses sanitasi layak berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan.

Hasil tersebut sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Sri, N. dkk (2020) yang sejalan dengan Mayasari (2020) sebagaimana hasil penelitiannya menyatakan bahwa terdapat hubungan negatif dan signifikan antara jumlah rumah tangga yang memiliki akses sanitasi layak dengan kemiskinan. Akses sanitasi layak adalah hal yang cukup vital dan sangat dibutuhkan untuk menjalankan aktivitas sehari-hari. Badan Pusat Statistik berpendapat bahwa sanitasi layak memegang peranan penting bagi kesehatan masyarakat, jika tingkat kesehatan masyarakat rendah maka akan berdampak pada tingginya tingkat kemiskinan. Dengan demikian, akses sanitasi layak sudah semestinya menjadi perhatian penting bagi pemerintah supaya melakukan pembangunan akses sanitasi layak utamanya di daerah-daerah miskin maupun terpencil yang seringkali tidak terjangkau banyak pihak. Kemudian melakukan upaya sosialisasi kepada

masyarakat akan pentingnya penggunaan sanitasi yang layak dan berkelanjutan. Karena pembangunan dan perbaikan sanitasi secara tidak langsung dapat mengurangi tingkat kemiskinan.

